

## ABSTRAK

Permasalahan yang sering mengiringi perceraian di pengadilan adalah persoalan pembagian harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik dari hasil usaha suami maupun istri. Permasalahan seperti ini seringkali menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dalam pembagiannya. Seperti dalam penerapan status dan kepemilikan, siapa yang lebih besar berkontribusi dalam pengadaan harta bersama tersebut dan percampuran harta bersama dengan harta bawaan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti lebih jauh dengan mengangkat permasalahan menjadi sebuah judul “Analiss Yuridis Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pati Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2020/Pa.Pt.) dari perumusa masalah yang memberikan tujuan penulisan sebagai berikut, pertama Untuk mengetahui hasil putusan perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati. Kedua untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati. Ketiga untuk mengetahui implikasi Pasal 97 KHI atas perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati.

Metode yang digunakan dalam peneitian oleh penulis adalah dengan metode yuridis sosiologis, dngan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan tinjauan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan sumber datanya berasal dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Serta analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian sesuai pasal 97 KHI yaitu suami dan istri masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta bersama. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana suami atau istri mendapat setengah bagian dari harta bersama karna keduanya berperan dalam pengadaan harta bersama. (3) Implikasi pasal 97 KHI dalam pembagian harta bersama akibat perceraian menghukum kedua pihak untuk membagi harta bersama sesuai putusan Majelis Hakim.

**Kata Kunci: Analisis Yuridis, Harta Bersama, Perceraian**

## **ABSTRACT**

The problem that often accompanies divorce in court is the issue of the distribution of joint assets or assets obtained in marriage bonds, both from the results of the husband's and wife's efforts. Problems like this often lead to disputes between the two parties in their distribution. As in the application of status and ownership, who contributes more in the procurement of the joint property and the mixing of joint property with innate property. Based on this background, the author is interested in researching further by raising the issue as a title "Juridical Analysis of the Implementation of the Distribution of Joint Assets Due to Divorce in accordance with Article 97 of the Compilation of Islamic Law (Case Study at the Pati Religious Court Decision Number 2395/Pdt.G/2020/Pa.Pt .) from the problem formulation which provides the following writing objectives, first to find out the results of the decision on the division of joint assets at the Pati Regency Religious Court. Second, to find out the basis for the judge's consideration in deciding the case regarding the distribution of joint assets at the Pati Regency Religious Court. Third, to find out the implications of Article 97 of the KHI on joint property cases at the Pati Regency Religious Court.

The method used in the research by the author is the sociological juridical method, with descriptive analysis research specifications. This research was conducted by considering a review of the Marriage Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. With the data source comes from primary data, secondary data, and tertiary data. And the data analysis used is descriptive qualitative with data collection techniques from documents.

The results of this study indicate that: (1) The implementation of the decision on the distribution of joint assets due to divorce in accordance with Article 97 of the KHI, namely husband and wife each get half of the joint property. (2) The basis for the judge's consideration in deciding the case for the distribution of joint property due to divorce is in accordance with the provisions of Article 97 of the Compilation of Islamic Law wherein the husband or wife gets half of the joint property because both play a role in the procurement of joint property. (3) The implication of Article 97 of the KHI in the distribution of joint assets due to divorce punishes both parties to share joint assets according to the decision of the Panel of Judges.

***Keywords: Juridical Analysis, Joint Assets, Divorce***